



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/489/SULBAR/XII/2024 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Majene tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 967.176.533.791,00,- (*Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Milliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.832.887.617,00,- (*Seratus Sepuluh Milliar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.265.613.570,00,- (*Dua Puluh Empat Milliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.643.965.966,00,- *(Delapan Puluh Milliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)*.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.333.308.081,00,- *(Tiga Milliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah)*.
- (5) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.590.000.000,00,- *(Dua Milliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)*.

Pasal 4

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.265.613.570,00,- *(Dua Puluh Empat Milliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah)* , yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Sarang Burung Walet;
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 375.221.250,00,- *(Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)*.
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.256.000,00,- *(Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)*.
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.800.000,00,- *(Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)*.
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.600.200.000,00,- *(Satu Milliar Enam Ratus Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)*.

- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.313.960.000,00,- (*Lima Milliar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.823.802.400,00,- (*Satu Milliar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 9.136.236.420,00,- (*Sembilan Milliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.401.025.100,00,- (*Tiga Milliar Empat Ratus Satu Juta Dua Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah*).
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.564.112.400,00,- (*Dua Milliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.643.965.966,00,- (*Delapan Puluh Milliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.255.957.966,00,- (*Tujuh Puluh Tujuh Milliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.188.008.000,00,- (*Dua Milliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00,- (*Satu Milliar Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.333.308.081,00,- (*Tiga Milliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD.
- (2) Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.333.308.081,00,- (*Tiga Milliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.590.000.000,00,- (*Dua Milliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - e. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00,- (*Seratus Juta Rupiah*).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Milliar Rupiah*).
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*).
- (5) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.340.000.000,- (*Satu Milliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).
- (6) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

- (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan Rp. 856.343.646.174,00, (*Delapan Ratus Lima Puluh Enam Milliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 835.419.343.000,00,- (*Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Milliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.924.303.174,00,- (*Dua Puluh Milliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 835.419.343.000,00,- (*Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Milliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Desa;
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU);
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK):
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.655.853.000.00,- (*Lima Puluh Dua Milliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.826.710.000,00 (*Lima Milliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 558.884.377.000,- (*Lima Ratus Lima Puluh Delapan Milliar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 218.052.403.000,- (*Dua Ratus Delapan Belas Milliar Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.924.303.174,00 (*Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.924.303.174,00,- (*Dua Puluh Milliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 11

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 966.676.533.791,00,- (*Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Milliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 731.843.715.958,66,- (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Milliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;

- c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 476.334.538.403,00,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Milliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 245.317.023.037,66,- (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Milliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen*).
 - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.128.794.518,00,- (*Sepuluh Milliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 63.360.000,00,- (*Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 476.334.538.403,00,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 373.601.903.885,00,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Milliar Enam Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*), Terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;

- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian.
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 93.568.821.758,- (*Sembilan Puluh Tiga Milliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) Terdiri atas :
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.046.051.700,00,- (*Delapan Milliar Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), Terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Uang Paket DPRD;
 - d. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Reses DPRD;
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 178.256.900,00,- (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) , Terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - e. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - f. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 510.880.000,- (*Lima Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 428.624.160,00,- (*Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*), Terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 245.317.023.037,66,- (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Milliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.916.752.150,00,- (*Enam Puluh Tiga Milliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Barang Pakai Habis;

- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi;
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 78.349.056.447,00,- (*Tujuh Puluh Delapan Milliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), Terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - g. Belanja Beasiswa Pendidikan ASN;
 - h. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.436.661.463,00,- (*Tiga Belas Milliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.971.027.234,00,- (*Sembilan Belas Milliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 306.000.000,00,- (*Tiga Ratus Enam Juta Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 69.337.525.743,66,- (*Enam Puluh Sembilan Milliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Koma Enam puluh Enam Sen*), Terdiri atas:
- a. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 10.128.794.518,00,- (*Sepuluh Milliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00,- (*Delapan Ratus Milliar Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 838.258.518,00,- (*Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.490.536.000,00,- (*Delapan Milliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD
 - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan

Pasal 16

- Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 63.360.000,00,- (*Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*). Terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 119.799.959.375,34,- (*Seratus Sembilan Belas Milliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Koma Tiga Puluh Empat Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.204.071.070,00,- *(Satu Milliar Dua Ratus Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Rupiah)*.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.509.533.328,34,- *(Tiga Puluh Enam Milliar Lima Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah Koma Tiga Puluh Empat Sen)*.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.279.601.787,00,- *(Dua Puluh Lima Milliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)*.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.297.928.190,00,- *(Lima Puluh Enam Milliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah)*.
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 468.825.000,00,- *(Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)*.
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00,- *(Empat Puluh Juta Rupiah)*.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.204.071.070,00 *(Satu Milliar Dua Ratus Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Rupiah)*, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah Persil.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.204.071.070,00,- *(Satu Milliar Dua Ratus Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Rupiah)*.

Pasal 19

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.509.533.328,34,- (*Tiga Puluh Enam Milliar Lima Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah Koma Tiga Puluh Empat Sen*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - f. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - g. Belanja Modal Komputer;
 - h. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - i. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP
 - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.500.000,00,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bantu.
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 998.015.000,00,- (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Belas Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.974.900.840,00, (*Satu Milliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 43.707.100,00,- (*Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Seratus Rupiah*), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
- (6) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.027.702.900,00, (*Satu Milliar Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (7) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 130.910.000,00,- (*Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium
- (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 747.886.999,00,- (*Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (9) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 125.338.500,00,- (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
- (10) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 27.229.882.000,00,- (*Dua Puluh Tujuh Milliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS;
- (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.229.689.989,34,- (*Empat Milliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Koma Tiga Puluh Empat Sen*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

Pasal 20

- (1) Belanja Modal Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c di rencanakan sebesar Rp. 25.279.601.787,00,- (*Dua Puluh Lima Milliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di rencanakan sebesar Rp. 23.436.989.321,00,- (*Dua Puluh Tiga Milliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (3) Belanja Modal Monumen Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.354.465,00,- (*Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*);
 - a. Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti.
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.677.880.928,00,- (*Satu Milliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
 - a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp. 161.377.073,00,- (*Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.297.928.190,00,- (*Lima Puluh Enam Milliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;

- c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Moda Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 49.064.391.107,00,- (*Empat Puluh Sembilan Milliar Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.819.790.235,00,- (*Enam Milliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 277.746.848,00,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah;
 - b. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik.
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 136.000.000,00,- (*Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jaringan Listrik.

Pasal 22

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 468.825.000,00,- (*Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), terdiri atas

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan.

Pasal 23

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*), terdiri atas

- a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga; dan Belanja Transfer Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.260.000.000,00,- (*Tiga Milliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga
- (2) Belanja Modal Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.260.000.000,- (*Tiga Milliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp. 111.772.858.457,00,- (*Seratus Sebelas Milliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Anggaran belanja bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.696.704.257,00,- (*Dua Milliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah kabupaten/Kota dan Desa
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 109.076.154.200,00,- (*Seratus Sembilan Milliar Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.

Pasal 26

- Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 27

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 500.000.000,00,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. (500.000.000,00,-) (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 31

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

3. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;
4. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;
5. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IVb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran VIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
11. Lampiran VIc : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
12. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
13. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

Pasal 32

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

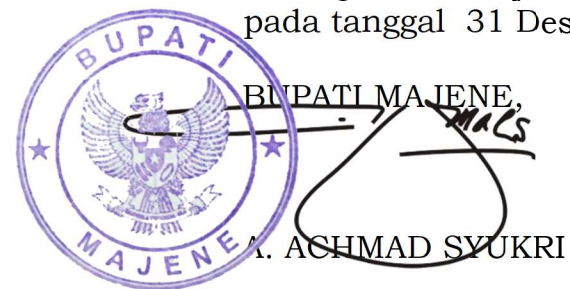
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Bupati Majene ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Majene
pada tanggal 31 Desember 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024 NOMOR 18.



KABUPATEN MAJENE
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	110.832.887.617,00
4.1.01	Pajak Daerah	24.265.613.570,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	375.221.250,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	236.450.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	236.450.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	136.391.250,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	136.391.250,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	400.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	400.000,00
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	1.980.000,00
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	1.980.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	20.256.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	20.256.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	20.256.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	30.800.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	30.800.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	30.800.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.600.200.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	234.000.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	234.000.000,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	141.000.000,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	141.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.225.200.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.225.200.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.313.960.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	5.313.960.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.313.960.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.823.802.400,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1.823.802.400,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.823.802.400,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	9.136.236.420,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.506.381.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	408.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.098.381.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	6.816.267.420,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	6.816.267.420,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	700.008.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	465.708.000,00
4.1.01.19.03.0005	PBJT-Motel	204.108.000,00
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	30.192.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	113.580.000,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	113.580.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.401.025.100,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	3.401.025.100,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	3.401.025.100,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.564.112.400,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	2.564.112.400,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	2.564.112.400,00
4.1.02	Retribusi Daerah	80.643.965.966,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	77.255.957.966,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	74.157.216.966,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	17.937.216.966,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	56.220.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	575.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	575.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	889.440.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	889.440.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.574.301.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	1.131.981.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	173.400.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	268.920.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	60.000.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	60.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.188.008.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	977.088.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	150.000.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	226.560.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	600.528.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	81.360.000,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	81.360.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	310.560.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	310.560.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	800.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	800.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	19.000.000,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	19.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.200.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.200.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.200.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.333.308.081,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.333.308.081,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.333.308.081,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.333.308.081,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.590.000.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00
4.1.04.01.05.0055	Hasil Penjualan Biota Perairan-Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	100.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.000.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	100.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	100.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	100.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.340.000.000,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.000.000.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.000.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	340.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	340.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	856.343.646.174,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	835.419.343.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	52.655.853.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	52.655.853.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	52.655.853.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.826.710.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	3.853.907.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	852.913.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	3.000.994.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.464.728.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	153.631.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	14.223.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.296.874.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	508.075.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	508.075.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	558.884.377.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	399.410.099.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	399.410.099.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	159.474.278.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	4.000.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	33.917.809.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	53.784.932.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	44.130.902.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	23.640.635.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	218.052.403.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	68.371.261.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	728.126.000,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	384.935.000,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	422.800.000,00
4.2.01.09.01.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	322.006.000,00
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	43.917.299.000,00
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.704.411.000,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.873.861.000,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	11.017.823.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	149.681.142.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	25.656.882.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.573.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	81.400.707.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.114.250.000,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	10.051.326.000,00
4.2.01.09.02.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	492.085.000,00
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	354.629.000,00
4.2.01.09.02.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	499.994.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.868.896.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	135.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	3.351.640.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.787.007.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	10.997.966.000,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.862.100.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.924.303.174,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	20.924.303.174,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.924.303.174,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.049.872.846,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	870.189.112,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.071.919.900,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	20.513.316,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.911.808.000,00
	Jumlah Pendapatan	967.176.533.791,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	731.843.715.958,66
5.1.01	Belanja Pegawai	476.334.538.403,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	373.601.903.885,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	284.644.732.409,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	211.164.787.909,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	73.479.944.500,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	26.442.817.134,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	19.313.936.734,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.128.880.400,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.557.540.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.557.540.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.357.789.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.357.789.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.924.815.300,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.571.785.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.353.030.300,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	16.159.663.800,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.981.335.700,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.178.328.100,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	497.214.685,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	497.214.685,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.440.687,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.599.587,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.841.100,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	17.249.876.157,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	13.853.695.957,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.396.180.200,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	689.748.290,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	513.476.090,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	176.272.200,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.381.099.423,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.852.308.623,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	528.790.800,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.692.167.000,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.267.439.100,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	424.727.900,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	93.568.821.758,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	93.568.821.758,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	18.761.063,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	1.012.800,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	1.540.000,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	80.010.000,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	76.432.000,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	91.190.120,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	115.998.450,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	170.051.255,00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	128.205.620,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	44.472.000,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	78.715.050,00
5.1.01.02.06.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	3.000.000,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	48.854.400,00
5.1.01.02.06.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.068.000,00
5.1.01.02.06.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	15.528.000,00
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	35.000.000,00
5.1.01.02.06.0045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	950.000,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	60.000.000,00
5.1.01.02.06.0053	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	28.750.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	81.400.707.000,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	10.051.326.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.114.250.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.046.051.700,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	560.962.884,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	560.962.884,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	101.388.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	101.388.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.248.400,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.248.400,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	107.244.900,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	107.244.900,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	26.856.900,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	26.856.900,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	28.077.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	28.077.000,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	35.000,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	35.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	977.331.016,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	63.540.232,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.347.696,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.043.088,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	908.400.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.700.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.700.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	240.660.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	240.660.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	178.256.900,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.543.880,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.543.880,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.100,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.100,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.730.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.730.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.800,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.800,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.420.960,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.420.960,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	428.624.160,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	428.624.160,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	428.624.160,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.317.023.037,66
5.1.02.01	Belanja Barang	63.916.752.150,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	63.909.351.650,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	46.551.400,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	691.862.960,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.650.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	175.427.200,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	359.726.915,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.355.411.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	14.930.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	141.432.670,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	14.977.400,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	2.151.650,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	37.469.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.262.897.433,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	624.547.321,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.703.622.588,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	354.349.246,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	360.710.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	300.004.665,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	738.287.500,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	125.530.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	241.403.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	52.600.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.238.293.630,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.326.021.706,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	31.353.138.120,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.714.431.277,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.366.273.150,00
5.1.02.01.01.0047	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	14.430.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.128.524.319,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.092.181.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	7.020.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	48.496.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	15.000.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	5.100.000,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	5.100.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.300.500,00
5.1.02.01.04.0038	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.660.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	640.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	78.349.056.447,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	40.278.496.714,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.293.989.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.848.960.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	60.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	3.200.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	13.800.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	93.000.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	728.400.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.420.566.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	105.600.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	286.600.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	641.800.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	789.900.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	88.200.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	300.600.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	164.134.526,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.235.666.498,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.589.850.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.349.040.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	39.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	952.549.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	378.800.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	75.000.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	189.000.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	1.780.200.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	146.050.000,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	12.500.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	3.302.500,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	61.800.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	4.200.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.251.178.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	20.800.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	72.896.385,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.553.669.110,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	577.425.332,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.573.194.737,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	133.921.200,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	386.650.640,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	3.095.000.016,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.384.398.770,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	245.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	37.440.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	279.215.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.720.214.688,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.290.535.080,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	18.376.000.024,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	83.428.800,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.411.200,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	936.339.584,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	32.500.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.266.929.900,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	60.000.000,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	60.032.500,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	861.930.400,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	57.700.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.937.500,00
5.1.02.02.04.0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	450.000,00
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	4.500.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	19.481.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	68.922.500,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	120.276.000,00
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	700.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.560.751.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.015.469.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	253.257.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.125.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	275.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	900.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.271.695.325,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	73.600.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	7.393.235.325,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	500.000.000,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	2.204.860.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.952.418.820,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	18.980.000,00
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	1.739.886.160,00
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	868.700.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	386.000.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	889.106.860,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	49.745.800,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	173.550.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	108.500.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	65.050.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	125.000.000,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	125.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	13.436.661.463,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.229.810.300,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	34.359.000,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	226.487.000,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	177.174.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	232.483.820,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	17.340.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	857.872.260,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.189.208.420,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	265.179.900,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	95.164.800,00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	29.523.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	12.260.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	55.272.100,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	480.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	30.003.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	7.003.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	728.804.200,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	472.348.000,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	50.000.000,00
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	98.416.200,00
5.1.02.03.03.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	2.072.000,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	105.968.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.478.046.963,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	2.249.846.700,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	448.929.100,00
5.1.02.03.04.0051	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	4.929.271.163,00
5.1.02.03.04.0052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.850.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.971.027.234,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.971.027.234,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.430.389.104,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	333.282.060,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.155.416.070,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35.520.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	16.420.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	306.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	306.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	306.000.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	69.337.525.743,66
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	69.337.525.743,66
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	69.337.525.743,66
5.1.05	Belanja Hibah	10.128.794.518,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	800.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	300.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	300.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	500.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	500.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	838.258.518,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	838.258.518,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	838.258.518,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	8.490.536.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.003.896.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.003.896.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.486.640.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.486.640.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	63.360.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	63.360.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	63.360.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	63.360.000,00
5.2	BELANJA MODAL	119.799.959.375,34
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.204.071.070,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.204.071.070,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.204.071.070,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.204.071.070,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.509.533.328,34
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.500.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.500.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	1.500.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	998.015.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	958.865.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	59.565.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	126.300.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	773.000.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	39.150.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.250.000,00
5.2.02.02.02.0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	36.900.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.974.900.840,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	38.010.585,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.010.585,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	32.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.864.290.255,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.416.763.305,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	9.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	185.324.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	253.202.950,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	72.600.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	72.600.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	43.707.100,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	43.707.100,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	11.273.100,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	32.434.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.027.702.900,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.027.702.900,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.027.702.900,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	130.910.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	130.910.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	130.910.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	747.886.999,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	715.939.524,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	715.939.524,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	31.947.475,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	30.214.999,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.732.476,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	125.338.500,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	125.338.500,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	125.338.500,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	27.229.882.000,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	27.229.882.000,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	27.229.882.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.229.689.989,34
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.229.689.989,34
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.229.689.989,34
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.279.601.787,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	23.436.989.321,00

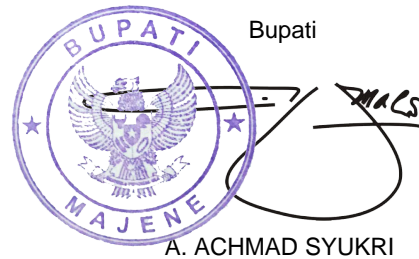
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	23.147.801.048,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	976.233.852,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	11.295.536.540,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	199.983.200,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.111.621.843,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.175.451.813,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.950.000,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	1.359.378.300,00
5.2.03.01.01.0017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	79.995.900,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	797.789.600,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	100.000.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	47.860.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	289.188.273,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	8.991.694,00
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	280.196.579,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	3.354.465,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	3.354.465,00
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	3.354.465,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.677.880.928,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.677.880.928,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.677.880.928,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	161.377.073,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	161.377.073,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	161.377.073,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	56.297.928.190,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	49.064.391.107,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	48.864.391.107,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	48.859.902.207,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	4.488.900,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	200.000.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	200.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	6.819.790.235,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	6.624.790.235,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.598.355.680,00
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	2.134.130.060,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.883.329.495,00
5.2.04.02.04.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	8.975.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	195.000.000,00
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	195.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	277.746.848,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	40.245.848,00
5.2.04.03.03.0002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	40.245.848,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	237.501.000,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	237.501.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	136.000.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	136.000.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	136.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	468.825.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	468.825.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	468.825.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	468.825.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	40.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	40.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	40.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	40.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.260.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.260.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.260.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.260.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.260.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	111.772.858.457,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.696.704.257,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.048.029.357,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.048.029.357,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.048.029.357,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	648.674.900,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	648.674.900,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	648.674.900,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	109.076.154.200,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	109.076.154.200,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	109.076.154.200,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	52.655.853.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	56.420.301.200,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	966.676.533.791,00
	Total Surplus/(Defisit)	500.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	500.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-500.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Majene, 31 Desember 2024

Bupati



A. ACHMAD SYUKRI